



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021.
Masa Sidang ke- : III (Tiga)
Sifat Rapat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : 1. **Prof. Dr. Ainun Na'im** Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI
2. **Totok Suprayitno, Ph.D** Plt. Kabalitbangbuk Kemendikbud RI
3. **Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si.** Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI
4. **Purwanto** Direktur Anggaran Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu RI
5. **Andin Hadiyanto** Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI
6. **Sudarso** Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI
7. **Putut Hari Satyaka** Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
8. **Dr. Subandi Sarjoko** Deputi Bid. Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan BAPPENAS RI
9. **Dr. Amich Alhumamih** Direktur Pendidikan Agama dan Kebudayaan BAPPENAS RI
10. **Dr. Tatang Muttaqin** Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK BAPPENAS RI
11. **Andi Sudirman Sulaiman** Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
12. **Prof. Muhammad Jufri, M.Si. M.Psi.** Kepala Dinas Pendidikan Sulsel
13. **Ir. Benediktus Polo Maing** Sekretaris Daerah Provinsi NTT
14. **Linus Lusi, S.Pd. M.Pd.** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT
15. **H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM.,** Walikota Banda Aceh
16. **Faisal, S.STP** Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan
17. **Drs. Saminan, M.Pd** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
18. **Salman Ishak** Kepala Majelis Pendidikan Daerah

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
 Pukul : 10.00 – Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).

Pimpinan Rapat : **Syaiful Huda** (Ketua Panja/Ketua Komisi X DPR RI)
 Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
 Agenda acara : 1. Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI Aspek Anggaran Pendidikan;
 2. Isu lain yang berkaitan Anggaran Pendidikan.

Hadir Komisi X DPR RI : 21 orang dari 31 orang Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

Hadir Narasumber : 1. **Prof. Dr. Ainun Na'im** Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI
 2. **Totok Suprayitno, Ph.D** Plt. Kabalitbangbuk Kemendikbud RI
 3. **Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si.** Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI
 4. **Purwanto** Direktur Anggaran Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – Kemenkeu RI
 5. **Andin Hadiyanto** Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI
 6. **Sudarso** Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI
 7. **Putut Hari Satyaka** Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
 8. **Dr. Subandi Sarjoko** Deputi Bid. Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan BAPPENAS RI
 9. **Dr. Amich Alhumamih** Direktur Pendidikan Agama dan Kebudayaan BAPPENAS RI
 10. **Dr. Tatang Muttaqin** Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK BAPPENAS RI
 11. **Andi Sudirman Sulaiman** Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
 12. **Prof. Muhammad Jufri, M.Si. M.Psi.** Kepala Dinas Pendidikan Sulsel
 13. **Ir. Benediktus Polo Maing** Sekretaris Daerah Provinsi NTT
 14. **Linus Lusi, S.Pd. M.Pd.** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT
 15. **H. Aminullah Usman, SE., Ak., M.M.,** Walikota Banda Aceh
 16. **Faisal, S.STP** Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan
 17. **Drs. Saminan, M.Pd** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
 18. **Salman Ishak** Kepala Majelis Pendidikan Daerah

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10:15 WIB oleh Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan **Andin Hadiyanto, Purwanto, Putut Hari Satyaka, Dr. Mochammad Ardian Noervianto, M.Si., Dr.Subandi Sarjoko, Ir. Benediktus Polo Maing, H. Aminullah Usman, SE., Ak., M.M., Andi Sudirman Sulaiman, Prof. Muhammad Jufri, M.Si. M.Psi., Prof. Dr. Ainun Na'im, Totok Suprayitno, Ph.D**, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pejabat Eselon I Kemendikbud RI, Kemenkeu RI, Kemendagri RI, Bappenas RI, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. Kemenkeu RI menyampaikan bahwa reformulasi anggaran fungsi pendidikan masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan 5 faktor yang mempengaruhinya antara lain:
 - a. prioritas kebijakan dan anggaran Pemerintah;
 - b. kebijakan ekonomi makro, fiskal dan ketersediaan anggaran; dan
 - c. realisasi kinerja dan usulan pemangku pendidikan Pusat dan Daerah.
2. Kemendagri RI menyampaikan bahwa diperlukan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan anggaran pendidikan sesuai dengan pembagian urusan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bappenas RI menyampaikan Peta Jalan Pendidikan (PJP) seharusnya juga memperhatikan kebijakan pembangunan SDM dalam RPJMN serta perlu memasukkan konsep alokasi anggaran oleh pusat dan daerah.
4. Pemerintah Daerah mendukung Peta Jalan Pendidikan (PJP) dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah pendidikan di daerah, antara lain:
 - a. utamanya memberikan kouta lebih bagi daerah yang kekurangan guru dan untuk guru mengikuti program peningkatan mutu.
 - b. pemenuhan sarana prasana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - c. meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh melalui pemberian modul-modul daring yang dapat digunakan di daerah 3T.
 - d. kedepan pembelajaran jarak jauh perlu menjadi alternatif pembelajaran beserta skema anggarannya selain sekolah tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan.
 - e. Peta Jalan Pendidikan (PJP) harus mampu mempersiapkan sistem pendidikan menghadapi tantangan paling penting yaitu transformasi

digital yang sedang dihadapi dunia pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan dukungan anggaran yang maksimal.

5. Kemendikbud RI menyampaikan bahwa Peta Jalan Pendidikan (PJP) perlu menegaskan pentingnya partisipasi dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan swasta untuk memajukan pendidikan melalui penguatan kebijakan afirmasi kepada DUDI dan sektor swasta yang memberikan kontribusi di bidang pendidikan.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah agar membuat reformulasi penghitungan anggaran pendidikan di daerah dengan memperhatikan pemisahan secara jelas antara dana transfer dari pusat dan anggaran daerah.
 2. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar Peta Jalan Pendidikan lebih visioner, efektif dan mampu mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban konstitusi mengalokasikan belanja APBD 20% untuk pendidikan.
 3. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan mengupayakan adanya dukungan anggaran dengan memperhatikan keseimbangan penyelenggaraan pendidikan oleh swasta atau masyarakat dan negeri.
 4. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah membuat perhitungan khusus bagi peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta) sehingga Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi.
 5. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk meletakkan Peta Jalan Pendidikan (PJP) diselaraskan dengan visi negara yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
 6. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperhatikan satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan di daerah 3T.
 7. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah membuat formulasi kontribusi dana dari dunia usaha dan dunia industri atau swasta yang dipergunakan untuk bidang pendidikan.
 8. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam memperkuat akuntabilitas, melalui pemanfaatan *Big Data* dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data keuangan, administrasi, dan hasil belajar siswa dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bidang Pendidikan yang lebih baik.
 9. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah memperhatikan tahapan pembahasan RAPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 18 dan Pasal 19 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama tahapan pembicaraan pendahuluan sehingga alokasi anggaran pendidikan dalam APBD dapat dikawal semua pemangku kepentingan.

- C. Panja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI meminta para Narasumber yang belum memberikan bahan paparan dan data yang belum disampaikan kepada Komisi X DPR RI yang selanjutnya akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan laporan panja.
- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan (PJP) Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

I. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14. 45 WIB

KETUA RAPAT,



Syaiful Huda